

RESPONS GEREJA TERHADAP KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI DALAM KONTEKS MASYARAKAT PERTANIAN INDONESIA

Eder Timanta Sitepu
Universitas Bina Nusantara

eder.sitepu@binus.ac.id

ABSTRACT

This study explores social inequality within the church in the context of agricultural communities as a result of poverty, economic disparity, and corruption. Data from the Central Bureau of Statistics (BPS) indicates that most farmers in rural areas remain vulnerable and far from prosperous. The inequality is driven by limited land ownership, unstable commodity prices, and economic policies that disadvantage farmers. As part of society, the church is called to take an active role through the spirituality of simplicity (ugahari), community empowerment, and the management of economic resources such as credit unions. The study concludes that poverty alleviation is not only the responsibility of the government but also a moral obligation of the church to promote social justice and collective well-being.

Keywords: Agriculture; Church; Poverty; Simplicity; and Social Inequality.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji ketimpangan sosial dalam gereja dalam konteks masyarakat pertanian sebagai dampak dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan korupsi. Data BPS menunjukkan mayoritas petani di pedesaan masih hidup dalam kondisi rentan dan jauh dari sejahtera. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan lahan yang sempit, harga komoditas yang tidak stabil, serta kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada petani. Gereja sebagai bagian dari masyarakat dipanggil untuk berperan aktif melalui spiritualitas ugahari (kesederhanaan), pemberdayaan jemaat, serta pengelolaan sumber daya ekonomi seperti credit union. Kajian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral gereja untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Gereja; Kemiskinan; Kesenjangan Sosial; Pertanian; dan Ugahari.

1. PENDAHULUAN

Keadaan bangsa terlihat semakin ironis ketika pada satu sisi ada orang yang sangat sulit untuk makan, namun di sisi yang lain ada orang yang sedang berfoya-foya dengan kekayaannya. Hal itu seakan menjadi hal yang lumrah di setiap negara. Masyarakat terdiri dari beberapa kelas sosial dilihat dari keadaan ekonominya. Sistem ekonomi pasar bebas menjadi ekonomi yang tidak bisa dihindarkan sehingga dampaknya dapat dilihat sekarang dalam masyarakat yang berkelas-kelas. Hal yang hampir sama terjadi di pedesaan. Masyarakat di pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga memiliki kelas-kelas. Hal ini dapat dilihat dari kisaran penghasilan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dengan kata lain, dalam masyarakat pedesaan sendiri juga terdapat kesenjangan ekonomi.

Menurut data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian 2025 tenaga kerja pertanian adalah tenaga kerja terbesar dengan jumlah 41,61 juta orang pada Februari 2025. Jumlah ini merupakan 28,55% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya.¹ pedesaan masih jauh dari kata sejahtera. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa ada 15,26 juta penduduk miskin di pedesaan, yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.² Faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani disebabkan oleh beberapa hal seperti: luas kepemilikan lahan, harga jual hasil pertanian, biaya produksi pertanian (bibit, pestisida, pupuk dll) dan lain sebagainya. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.³ Berdasarkan data BPS, NTP secara nasional pada tahun 2020 memang terlihat dalam tren surplus setiap bulannya. Tetapi NTP surplus tersebut tidak tersebar merata di semua daerah. Selain itu, daerah yang surplus pun masih mendekati angka impas (angka impas dalam NTP adalah 100). Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani masih sangat rentan terhadap berbagai faktor yang ada.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sering dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam sebuah negara sering menjadi biang permasalahan. Karena sistem dan kebijakan ekonomi akan mempengaruhi keadaan sebuah negara. Sejarah menunjukkan, sejak Indonesia merdeka konsep trilogy pembangunan dengan menggunakan teori *trickle down effect* yang diadopsi oleh Indonesia pada jaman Presiden Soeharto ternyata hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan menghasilkan disparitas yang tinggi antara golongan kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dikarenakan sebagian besar pendapatan nasional dihasilkan dari komoditas sumber daya Minyak dan Gas bukan dari sector manufaktur maupun sektor industry lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya ketika sumber daya tersebut tidak lagi mencukupi konsumsi dalam negeri dan akhirnya Negara harus mengekspor kebutuhan Migasnya.⁴

Gereja pun terkena dampak dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Keadaan tersebut membuat setiap elemen dalam sebuah negara harus berperan dan bertindak. Bukan tidak mungkin gereja memiliki kontribusi bagi masyarakat umum untuk mengatasi masalah kemiskinan. Gereja digugat keberadaannya untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia (Matius 5:13-16).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penafsiran data untuk

1 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2025 - Februari 2025 (Jakarta, 2025), 7.

2 Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025 (Jakarta, 2025), 3.

3 Badan Pusat Statistik, "Nilai Tukar Petani," Badan Pusat Statistik, 2021. ,
<https://www.bps.go.id/indicator/22/1741/1/ntp-nilai-tukar-petani-menurut-provinsi-2018-100-.html>

4 Yoghi Citra Pratama, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (2014):211.

memperoleh pemahaman yang mendalam terkait suatu fenomena.⁵. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terkait topik yang dibahas. Fokus penelitian diarahkan pada analisis ketimpangan sosial dalam gereja, khususnya dalam konteks masyarakat pertanian, serta peran gereja dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu masalah yang tidak pernah ada habisnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bukan saja di Indonesia, bahkan di negara-negara kaya juga terdapat kemiskinan. Kemiskinan adalah istilah yang relatif. Pengertian semula dari istilah ini menggambarkan syarat kehidupan manusia secara lahiriah, ekonomis dan sosial. Kenyataan hidup yang digambarkan di dalam pengertian ini tentunya sangat bergantung pada situasi sosial-ekonomi masyarakat umumnya dan tempat yang bersangkutan itu sendiri secara khusus. Dengan demikian tidak ada kemiripan antara orang bangsawan yang jatuh miskin dengan seorang tukang tenun miskin pada akhir abad ke-19. Istilah miskin menjadi suatu kedudukan yang dapat diukur secara material dan sosial di tengah-tengah masyarakat.⁶

Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.⁷

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan sisi kemiskinan. BKKBN Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Indikator yang digunakan adalah Pra Sejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sejahtera tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu

5 Matthew B. Miles and Michael A. Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)5-6

6 Wolfgang Stegemann, Injil Dan Orang-Orang Miskin (BPK Gunung Mulia, 1989)1-2.

7 Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan," Badan Pusat Statistik, 2021.
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>

memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi.⁸

Sementara itu, Lembaga PBB yang bergerak di bidang pembangunan, *United Nations Development Program* (UNDP) melihat kemiskinan dari pendekatan pembangunan manusia. Pendekatan ini membuat sebuah laporan bernama *Human Development Report* (HDR). Laporan tersebut berisi tentang satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu Index Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI). Indikator-indikator dalam HDR dapat dikelompokkan ke dalam enam dimensi. HDI, HPI dan GDI menggunakan tiga dimensi yang sama, yaitu: 1) Umur yang panjang dan hidup sehat; 2) Pengetahuan; 3) Standar hidup yang layak. Sedangkan indikator-indikator pada GEM menggunakan tiga dimensi yang berbeda yaitu: 1) Partisipasi politik; 2) Partisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan; 3) Memiliki kekuatan dalam sumberdaya ekonomi.⁹

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:¹⁰

- a. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- b. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata

8 Ade Cahyat, "Bagaimana Kemiskinan Diukur," *Governance Brief* 2 (2004), 3-4.

9 Ade Cahyat, "Bagaimana Kemiskinan Diukur," *Governance Brief* 2 (2004), 5-6.

10 Elvira Handayani Jacobus et al., "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2018):90

cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

- d. Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terka dang memiliki unsur diskriminatif

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga adalah: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kepemilikan asset.¹¹

Sementara itu, Menurut Kuncoro, seperti yang dikutip oleh Itang, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu:¹²

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan.

Menurut Mudrajad, seperti yang dikutip Dita dalam tulisannya, faktor-faktor di atas apabila tidak direspons dengan baik maka akan menimbulkan sebuah dampak yang akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan mengakibatkan rendahnya pula tabungan. Rendahnya tabungan maka rendah pula investasinya.¹³

Kesenjangan Ekonomi

11 Elvira Handayani Jacobus et al., "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2018):92.

12 Itang, "FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN," *Tazkiya* 16 (2015), 7-8.

13 Dita Wahyu Puspita, "ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH," *JEJAK* 8, no. 1 [2015], <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>

Kemiskinan meningkat tajam di tengah masyarakat yang kaya. Dan lagi, secara ekonomis kita mengharapkan bahwa penciptaan kekayaan akan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, perhatikanlah pola yang ada di negara-negara Industri. Statistik menunjukkan bahwa orang miskin di Amerika meningkat lebih dari dua juta orang dibandingkan tahun 1990, menjadi sekitar 35,7 juta atau sekitar 14,2 % dari jumlah penduduk Amerika Serikat. Ini adalah angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Menurut The Departement of Housing and Urban Development, jumlah orang yang tinggal di emperan berkembang sebanyak 155% antara tahun 1984 dan 1988, tahun-tahun yang termasuk dalam periode terpanjang tanpa peperangan bagi pertumbuhan GNP berkelanjutan dalam sejarah Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, kemiskinan melampaui batas di pedalaman Amerika Serikat bagian utara, bahkan di tengah tingkat produksi pertanian yang menakjubkan.¹⁴

Kontras antara kaya dan miskin sekali-kali tidak bersamaan dengan garis pemisah Utara-Selatan. Sebab negara-negara OPEC adalah kaya, dan siapa bilang kemiskinan tidak terdapat di Amerika Utara atau di Eropa? Misalnya, di Inggris masih terdapat lebih 6 juta orang yang hidup pada garis kemiskinan, dan lebih dua kali jumlah itu yang hidup pas-pasan. Itulah sebabnya dalam bulan Juli 1982 gereja-gereja di Inggris melaksanakan suatu “aksi menanggulangi kemiskinan”. Yang benar ialah bahwa jurang antara orang kaya dan miskin bukan saja terdapat di antara bangsa-bangsa melainkan di tengah sebagian terbesar bangsa-bangsa. Kesenjangan yang mencolok antara kekayaan dan kemiskinan adalah suatu ketimpangan sosial yang tak bisa dan tak boleh diterima bagi hati nurani Kristiani. Memang, kemiskinan yang amat sangat sungguh merendahkan martabat manusia. Manusia dijabarkan menjadi setingkat dengan binatang. Kita orang Kristen patut digusarkan oleh pemujaan patung dewa-dewa di Atena. Namun, sama seperti Yesus, tatkala melihat orang banyak yang kelaparan itu, maka kita juga harus digerakn oleh belas kasihan, sehingga rela untuk memberi makan mereka.¹⁵

Gunnar Myrdal mendekati masalah kemiskinan terutama dari sudut ekonomi. Myrdall menekankan bahwa kendatipun ada banyak budaya dan latar belakang, kemiskinan dan ketidakseimbangan merupakan gejala besar Asia. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diangkat mengenai kenyataan-kenyataan ini adalah: apakah penyebab dan sumber dari semua kesulitan ini? Apakah penyebabnya harus dicari dalam diri orang-orang itu sendiri (karena kemalasannya)? Ataukah ada sesuatu yang terletak di luar kuasa mereka yang membuatnya tidak mampu mengubah kondisinya dan dengan demikian menolong dirinya sendiri? Pesan Konferensi Kandi menekankan kenyataan bahwa penderitaan dibuat dan disebabkan oleh manusia. kemiskinan adalah buah dari keadaan berdosa, dari struktur-struktur sosial yang menindas, dari korupsi di negara-negara tertentu dan dari suatu sistem internasional yang tidak adil. Jadi dengan tepat disini ditekankan adanya peranan faktor-faktor di luar yang menyebabkan kemiskinan. Salah satunya adalah masa kolonialisme yang panjang. Karena itu jelas bahwa bila masyarakat di Asia berbicara tentang kemiskinan, mereka pertama-tama memaksudkan situasi di mana orang menemukan diri mereka dalam struktur sosial yang menindas, hingga mereka jarang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Nirmala Fernando menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni, ketidakadilan

14 Bob Goudzwaard and Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan Dan Kemakmuran* (Kanisius, 1998), 14-15.

15 John Stott, *Isu-Isu Global* (YKKBK, 1994), 301-303.

struktural, penindasan dari sistem kapitalis dan perampokan sistematis terhadap negara-negara Dunia Ketiga oleh negara-negara maju.¹⁶

Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. Perencanaan pembangunan yang sentralistik, tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan.¹⁷

Keadaan terkini terkait kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat terlihat dari data yang disajikan oleh BPS berdasarkan Gini Ratio. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Tingkat ketimpangan penduduk Indonesia berdasarkan Gini Ratio per September 2025 berada di angka 0,363. Sementara itu, Gini Ratio di wilayah pedesaan berada di angka 0,295 dan di wilayah perkotaan 0,383. Dengan kata lain, meskipun ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi, ketimpangan di desa juga merupakan sebuah masalah.¹⁸

Gini Ratio di wilayah pedesaan salah satunya dipengaruhi oleh kepemilikan luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebagian besar merupakan rumah tangga petani gurem. Petani gurem oleh BPS didefinisikan sebagai petani yang mengerjakan lahan pertanian yang luasnya tidak lebih dari 0,5 hektar atau 5.000 m². Berdasarkan hasil pencacahan lengkap survei pertanian antar sensus tahun 2018 oleh BPS, jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan tak lebih dari 5000 m² berjumlah 17.551.282 dari total 28.187.752 rumah tangga pertanian.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan juga terjadi di pedesaan. Sepertinya pemerintah tidak boleh hanya gencar melakukan legalisasi aset tanah petani, tetapi juga harus diseimbangkan dengan redistribusi kepemilikan tanah kepada kelompok masyarakat yang sangat rentan seperti petani penggarap dan petani gurem.

Pemerintah dalam menghadapi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi selalu ada dalam program setiap pemerintahan dari masa ke masa. Program pengurangan kemiskinan jadi komitmen dari semua pemimpin negara. Oleh

16 A.A. Yewangoe, *Theologia Crucis Di Asia* (BPK Gunung Mulia, 1989), 8-10.

17 Kemendesa, "Desa Tanpa Kesenjangan," <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-nomor-10-des-tanpa-kesenjangan/> 2021.

18 Badan Pusat Statistik, "Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah", (Badan Pusat Statistik, 2025).

19 Badan Pusat Statistik, *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023* (Jakarta, 2023), 110.

sebab itu, dapat terlihat terjadi penurunan kemiskinan dari waktu ke waktu. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:²⁰

1. Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Program Indonesia Sehat (PIS)
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan
5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6. Program Dana Desa
7. Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga memaparkan program pengentasan kemiskinan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025:²¹

- a. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program sekolah rakyat.
- b. Penyaluran bantuan sosial (bansos) dan/atau program pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).
- d. Penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan bantuan pendidikan tinggi lainnya.
- e. Kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- f. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan program padat karya di tingkat desa.
- g. Pemberian bantuan perbaikan rumah, pembangunan rumah baru, dan/atau relokasi pemukiman.
- h. Penyiapan program pelatihan vokasi.
- i. Perluasan cakupan kepesertaan program jaminan ketenagakerjaan (jamsostek) bagi pekerja/buruh miskin.
- j. Pemberian akses program pemberdayaan pekerja migran.
- k. Pelaksanaan program perhutanan sosial.
- l. Penyelenggaraan pelayanan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
- m. Pelaksanaan program padat karya sektor perhubungan di wilayah kantong kemiskinan.

20 Anggun P. Situmorang, "Mengintip Program Pengentasan Kemiskinan Sejak Era Presiden Soeharto Hingga Jokowi," Merdeka.Com, Oktober 2021. <https://www.merdeka.com/uang/mengintip-program-pengentasan-kemiskinan-sejak-era-presiden-soeharto-hingga-jokowi.html>

21 Melynda Dwi Puspita, "16 Program yang Disiapkan Prabowo untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem", Tempo.co, 18 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/16-program-yang-disiapkan-prabowo-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-1232902>.

- n. Pemberdayaan penduduk miskin dan miskin ekstrem dalam program transmigrasi.
- o. Pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah serta ketahanan pangan masyarakat.
- p. Pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.

Dari paparan program pemerintah di atas, terlihat bahwa setiap pemerintahan memiliki pola program yang hampir sama dalam mengentaskan kemiskinan. Program-program di atas berfokus kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar keluarga miskin. Pemenuhan kebutuhan mendasar itu dilakukan dengan memberikan bantuan langsung berupa uang dan subsidi kebutuhan dasar untuk keluarga miskin. Seorang Teolog pernah mengkritik program pemerintah yang mengentas kemiskinan dengan cara memberikan bantuan sosial. Menurut Yonky Karman, seyogianya negara mengatasi kemiskinan bukan dengan bantuan yang membuat orang merasa miskin, tetapi kaum miskin tetap memiliki akses memperoleh kebutuhan dasar. Nilai-nilai sosial dibuat operasional. Martabat orang miskin terjaga ketika mereka menjadi tuan atas nasib sendiri. Untuk itu, negara wajib memfasilitasi warga untuk memiliki keterampilan minimal untuk hidup mandiri dan masuk dalam sistem rekrutmen pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat.²²

Gerry van Klinken mengkritisi beberapa hal terkait penelitian terhadap kelas-kelas di Indonesia. Hal pertama yang ia kritisi adalah tentang cara pengelompokan masyarakat ke dalam beberapa kelas. Menurutnya, pengelompokan kelas menengah berdasarkan tingkat konsumsi adalah salah satu trik akuntansi karena siapa saja yang memiliki penghasilan lebih dari 2 dollar per hari sudah masuk dalam kelompok kelas menengah. Pengelompokan masyarakat ke dalam kelas menengah juga menjadi masalah ketika hanya didasarkan atas kepemilikan barang-barang seperti televisi, kulkas dan lain sebagainya.²³

Selain itu, penelitian terhadap keadaan masyarakat di Indonesia tidak dapat membahasnya hanya dari segi statistik saja. Melainkan dari studi-studi yang lain yang lebih komprehensif seperti studi etnografi. Menurut Klinken, ide-ide keadaan masyarakat tidak dapat hanya dilihat dari pola konsumsi masyarakat, karena masyarakat sebenarnya telah dibentuk oleh persoalan-persoalan yang lebih bersifat relasional dan politis. Menurut Gerry van Klinken yang menjadi fokus terhadap penggolongan kelas masyarakat adalah bagaimana upaya yang dilakukan agar orang-orang miskin dapat keluar secara permanen dari kemiskinan itu. Artinya, bukan hanya di atas kertas mereka dianggap tidak miskin, tetapi dalam dunia nyata mereka memang sudah keluar dari kemiskinan itu.²⁴

Gereja di Tengah Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Garis pemikiran teologis tentang tugas gereja dalam masyarakat secara definitif dirumuskan dalam Sidang Raya DGI VII di Pematang Siantar 1971. Tema SR ini “Disuruh ke dalam dunia” dan Sub-thema “Tugas kita dalam negara Pancasila yang membangun”, gereja-gereja di Indonesia secara merumuskan kesatuan yang hakiki antara tugas pekabaran Injil dan partisipasi gereja dalam pembangunan. Dalam sidang ini dirumuskan bahwa gereja dipanggil

22 Yonky Karman, *Republik Galau Merajut Asa*. (Jakarta: Libri, 2014), 62.

23 Gerry van Klinken dan Ward Berenschot, ed., *In Search of Middle Indonesia* (KITLV & Yayasan Obor Indonesia, 2016), 1-2.

24 Gerry van Klinken and Ward Berenschot, eds., *In Search of Middle Indonesia* (KITLV & Yayasan Obor Indonesia, 2016), 4.

untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang miskin; untuk memberitakan pembebasan bagi orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan untuk memberitakan bahwa Tuhan telah datang (Luk 4:18-20).²⁵

Selain itu, Gereja dipanggil untuk turut serta secara bertanggungjawab dalam usaha membebaskan manusia dari penderitaan yang disebabkan oleh keterbelakangan, kemiskinan, penyakit, ketakutan dan ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, gereja dipanggil untuk mengusahakan keadilan dalam segala lapangan hidup; keadilan di bidang ekonomi dan politik, keadilan antara manusia dan golongan, bahkan keadilan dalam susunan masyarakat dan keadilan Internasional. Oleh karena itu, gereja serta merta ditantang untuk berjuang melenyapkan kepalsuan, kemunafikan, korupsi dan ketidakjujuran dalam rangka kesejahteraan semua manusia di bidang jasmani dan rohani. Perumusan yang diungkapkan di atas hendak mengingatkan gereja bahwa tugas yang diemban dalam dunia bukan hanya sekedar mendatangkan pertobatan dan pembaharuan dalam arti rohani saja, tetapi bahwa berita kesukaan yang dibawa oleh Yesus Kristus juga berarti kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan bagi manusia dan dunia ini.²⁶

Persoalan terbesar yang harus dihadapi sebagai bangsa dan negara adalah memenuhi janji Proklamasi yaitu untuk mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi cita-cita itu terasa makin jauh dan sulit dicapai. Memang benar, pada masa Orde Baru, pembangunan nasional gencar dilakukan. Ekonomi bertumbuh sangat pesat dan kemewahan hidup dapat dinikmati segelintir orang. Akan tetapi, kesenjangan antara kelompok miskin dengan yang kaya juga melebar, sementara hak-hak asasi manusia dan demokrasi dipancung demi stabilitas yang dibutuhkan bagi pembangunan. Reformasi mengubah haluan dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, memotong tali sentralisasi ekonomi dan mencanangkan otonomi daerah. Lagi-lagi kita mencatat dengan gentir, keterbukaan ruang demokrasi itu tidak diimbangi oleh kebijakan ekonomi yang memihak rakyat banyak. Kebijakan ekonomi yang diambil justru memihak pengusaha besar dan investor, baik dalam negeri maupun asing.²⁷

Kebijakan pertumbuhan ekonomi pasar bebas lebih memihak pada para pemodal besar yang menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan pendapatan yang makin meluas. Globalisasi ekonomi yang dijanjikan akan membuat dunia semakin sejahtera dengan menerapkan neoliberalisme yang ternyata tidak terwujud. Justru krisis demi krisis yang muncul. Orang-orang miskin yang jumlahnya makin membengkak menderita dampak terbesar dari berbagai krisis ini, yang dimana krisis ini disebabkan oleh penerapan paradigma pencarian keuntungan sebesar-besarnya yang lebih menguntungkan kelompok dominan atau pemilik modal dengan mengorbankan apa saja. Dalam pandangan gereja-gereja, etos dan struktur keserakahan ini adalah dosa dan kejahatan yang bakal membawa kepada kematian dan kehancuran. Sudah lama gereja-gereja sedunia menyuarakan keprihatinan pada globalisasi keserakahan itu, dan mengajukan alternatif pada dokumen AGAPE (alternative globalization

25 Karel Ph. Erari, *Supaya Engkau Membuka Belunggu Kemiskinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 102.

26 Karel Ph. Erari, *Supaya Engkau Membuka Belunggu Kemiskinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 103-104.

27 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja 2014-2019* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 73-74.

addressing people on earth) yakni suatu sistem ekonomi global yang dijalankan atas prinsip cinta kasih yang berorientasi pada Allah, manusia dan alam semesta, di mana etos dominannya bukan pencarian untung melainkan cinta kasih. Di sini pembangunan ekonomi mengutamakan keadilan, damai sejahtera dan sukacita bersama, dari semua untuk semua.²⁸

Organisasi PGI tentu saja menjadi wadah yang tidak hanya mengurus hal-hal di dalam rumah ibadah. Hal ini dapat dilihat dari kolaborasi PGI dan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa waktu terakhir terlihat PGI ikut mendukung dan menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program koperasi merah putih.²⁹ Selain itu, gereja-gereja di Indonesia juga telah menunjukkan kepeduliannya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Moderamen GBKP memiliki unit diakonia bernama Yayasan Ate Keleng GBKP/ Parpem GBKP. Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP adalah salah satu unit pelayanan yang berfungsi untuk menyatakan misi pelayanan GBKP di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Melihat persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang dan yang semakin kompleks, maka adalah tugas gereja untuk memberitakan Kabar Baik sebagai tanda-tanda Kasih Allah berupa pembebasan dan pemulihan/perbaikan kehidupan manusia. Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP menetapkan visi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai visi tersebut, program pelayanan dilakukan secara terintegrasi melalui pendidikan dan penyadaran bersama-sama dengan jemaat (majelis jemaat), klasis, moderamen dan lembaga-lembaga GBKP.³⁰ Saat ini Yayasan Ate Keleng GBKP telah memiliki 175 kelompok dampingan yang tersebar di berbagai desa di Sumatera Utara. Kelompok dampingan ini dibimbing dengan berbagai kegiatan seperti: Simpan Pinjam; Pendidikan Pembukuan; Pendidikan Wirausaha; Pendidikan Pertanian; Pendidikan Peternakan dan lain sebagainya.³¹ Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Yayasan Ate Keleng GBKP antara lain:

4. Membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan pengakuan GBKP untuk menyampaikan kasih kepada seluruh umat manusia.
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga serta memerangi kemiskinan.
6. Membantu kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah di desa-desa tertinggal, pedesaan dan di kota (keadilan sosial).
7. Mengadakan, melaksanakan latihan-latihan keterampilan di bidang pertanian organik, peternakan, perikanan dan pemasaran.
8. Membangun sarana listrik dan air minum, jamban keluarga di pedesaan.³²

28 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja 2014-2019* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 75.

29 PGI, "Pemberdayaan Daerah 3T: PGI, TCI dan Kemenkop RI Siap Berkolaborasi Lewat Program Koperasi Merah Putih", PGI, 21 Mei 2025.

30 Moderamen GBKP, "Pelayanan Diakonia GBKP", Moderamen GBKP, 2026, https://gbkp.or.id/new/?page=pelayanan_diakonia_bahasa&lang=bahasa#yak.

31 YAK GBKP, "Kelompok Dampingan", YAK/PARPEM GBKP, 2026, https://yakparpem.org/2025/?page_id=490.

32 YAK GBKP, "Program YAK GBKP", YAK/PARPEM GBKP, 2026, https://yakparpem.org/2025/?page_id=148.

Spiritualitas Ugahari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ugahari” berarti sedang; pertengahan; sederhana. Keugaharian dapat diartikan sebagai kesederhanaan atau kesahajaan. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengadakan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Kabupaten Malinau. Thema dalam persidangan ini ialah “Tuhan mengangkat kita dari samudera raya (Mazmur 71:20b)” dengan sub-thema “dalam solidaritas sesama anak bangsa, kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan”. Secara khusus sidang MPL ini menyoroti pikiran pokok “Spiritualitas Keugaharian”. Dalam diskusi ini, dipaparkan kajian spiritualitas keugaharian dengan pendekatan keahlian masing-masing. Secara konkret spiritualitas keugaharian diwujudkan dengan kontribusi gereja dalam pencegahan korupsi yang selama ini berlangsung, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Pdt. Albertus Patty memberikan sebuah refleksi teologis tentang spiritualitas keugaharian. Ia menyoroti kecenderungan sifat kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam. Albertus menyatakan bahwa “ugahari” tidak hanya bermakna cukup dalam hal mengumpulkan kekayaan tetapi “ugahari” juga dilihat sebagai spiritualitas dengan menyadari bahwa lingkungan hidup dan semesta ciptaan Allah harus didayagunakan secara cukup dan tidak sewenang-wenang.³³

Di dalam Matius 6:9-13 yang sering disebut dengan Doa Bapa Kami, secara terselubung tersirat makna keugaharian di dalamnya. Pada bagian “berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”, mengajarkan umat Kristen untuk menyadari bahwa sumber segala berkat adalah Tuhan, dan Tuhan pastilah memelihara anak-anakNya tiap-tiap hari. Kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat akan mengubah cara pandang manusia dalam bekerja dan mencari keuntungan. Manusia akan bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya karena kekuatirannya tetapi manusia akan bekerja dengan motivasi bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Bagian Doa Bapa Kami ini juga mengajarkan manusia khususnya umat Kristen untuk memohon kepada Tuhan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri dan bukan memohon hal yang berlebihan untuk memuaskan keinginannya. Singkatnya, Doa Bapa Kami juga mengajarkan kita untuk hidup tidak serakah dan hidup secara sederhana.³⁴

Pemberdayaan Jemaat

Menurut Fibry Jati Nugroho, pemberdayaan merupakan sebuah alternatif yang dapat dikembangkan oleh gereja. Jemaat bukan hanya mendapatkan ajaran dan ujaran dari Sang Pembawa Firman, akan tetapi lebih dapat diberdayakan untuk dapat mandiri. Tugas holistik gereja menjadi lengkap ketika memasukkan pemberdayaan di dalam fungsi pastoralnya. agama bukan saja sebagai lembaga, melainkan sebagai usaha untuk menumbuh-kembangkan kehidupan spiritualitasnya, yang membuahkan tingkah laku yang sesuai dengan ajarannya. Lewat pengalaman spiritualitas yang mendalam, seseorang akan mampu menjadikan dirinya

33 Markus Saragih, “Keugaharian: Cukup Dan Berbagi Untuk Keberlanjutan Hidup,” Berita Oikumene (Jakarta), Februari 2016: 3-6.

34 Dennie Olden Frans, Penuntun Rohani Ziarah Ke Tanah Perjanjian (Jakarta: Promised Land Pilgrimage, 2010), 28..

sejahtera secara utuh. Esensi dari spiritualitas bukan hanya tingkat pemahaman tentang Tuhan, melainkan implikasi kehidupan yang mengejutkan ajaran Tuhan dalam sikap dan perilakunya setiap hari. Di sinilah tugas dari agama (gereja) untuk dapat memberdayakan jemaat, agar mampu meningkatkan spiritualitasnya dalam memperjuangkan iman di tengah realitas sosial yang ada.³⁵

Hubungan pendeta dengan jemaat tidak hanya sebatas membahas alkitab dan bernyanyi rohani, tetapi hubungan yang dibangun adalah hubungan yang juga membicarakan kehidupan sehari-hari, mulai dari ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Artinya, pendeta di pedesaan dituntut memiliki hubungan yang lebih intim dengan jemaat di pedesaan. Meskipun dalam suasana kegiatan ibadah gerejawi, pendeta dituntut untuk tetap membicarakan hal-hal sehari-hari kepada jemaat supaya jemaat merasa bahwa beribadah bukan sebuah dunia lain di luar kehidupan sehari-hari, tetapi beribadah sangat erat kaitannya dengan hidup sehari-hari.³⁶

Program yang sistematis juga menjadi poin penting ketika berbicara tentang cara bergereja dalam konteks ketimpangan ekonomi. Biasanya di pedesaan sulit sekali melaksanakan sebuah program yang sistematis. Kendalanya, biasanya adalah semangat dan keinginan dari jemaat yang pasang surut ketika menghadapi tantangan dalam melaksanakan program yang bersifat sistematis. Oleh sebab itu, penulis buku ini menekankan pentingnya motivasi, komunikasi dan bimbingan yang baik terhadap jemaat yang ikut serta dalam program yang sistematis ini. Buku ini juga memberikan sebuah cara pandang baru tentang jemaat di pedesaan. Salah satu kendala besar dalam proses pembangunan di desa adalah masalah mental, bukan teknik. Secara teknik masyarakat desa mungkin dapat cepat memahaminya, tetapi masalah mental sering kali menjadi momok besar dalam pembangunan di pedesaan. Misalnya, apabila ada program dalam gereja yang berkaitan dengan pertanian, biasanya yang menjadi kendala bukan teknik pertaniannya, tetapi masalah mental yang terpelihara untuk tetap berjuang menyelesaikan sebuah program.³⁷

4. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks. Kemiskinan sering kali dilihat sebagai masalah yang sulit untuk diatasi. Salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tentu telah banyak membantu masyarakat Indonesia. Tetapi dalam beberapa kasus, pengentasan kemiskinan tampaknya tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pemerintah yang saling bertolak belakang sehingga menimbulkan masalah kemiskinan baru di masyarakat. Meskipun pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesenjangan ekonomi belum dapat diselesaikan dengan maksimal, gereja tentu saja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus turut serta menyuarakan suara kritisnya terhadap berbagai kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

35 Fibry Jati Nugroho, "Gereja Dan Kemiskinan," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019): 109.

36 J.J. Tomaso, *Sekitar Geredja Dan Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1971), 17-18.

37 J.J. Tomaso, *Sekitar Geredja Dan Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1971), 56-58.

Usaha-usaha penyampaian pendapat itu dapat dilakukan dengan berbagai forum di tengah masyarakat, terutama yang berfokus untuk membela kepentingan masyarakat miskin.

Sikap manusia yang kurang peduli satu dengan yang lain mengakibatkan kesenjangan yang terlalu tinggi. Artinya, orang kaya terus berusaha untuk menjadi lebih kaya tanpa memperhatikan orang-orang miskin di sekitarnya yang sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Seandainya, orang kaya memperhatikan rakyat miskin maka kesenjangan ekonomi pun tidak akan terlalu mencolok satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kemiskinan adalah salah satu dampak dari ketidakpedulian manusia dengan sesamanya. Melihat dampak dari ketidakpedulian manusia ini maka gereja dan pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengentas kemiskinan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk hidup dalam kecukupan (ugahari) dan umat Kristen juga diajarkan untuk lebih menghayati Doa Bapa Kami yang sering diucapkan dalam berbagai persekutuan Kristen.

Selain mengedukasi masyarakat, gereja dan pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat itu dengan memberikan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Gereja secara khusus juga memberdayakan jemaat supaya dapat hidup sejahtera misalnya dengan membuat sebuah program yang sistematis yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Selain itu gereja juga dapat mengelola *Credit Union* (CU) milik gereja yang dapat memberikan modal usaha bagi jemaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2025. "Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah". Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025*. Jakarta.
- Cahyat, Ade. 2004. "Bagaimana Kemiskinan diukur." *Governance Brief* 2.
- Erari, Karel Ph. 1999. *Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Frans, Dennie Olden. 2010. *Penuntun Rohani Ziarah ke Tanah Perjanjian*. Jakarta: Promised Land Pilgrimage.
- Goudzwaard, Bob, dan Harry de Lange. 1998. *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Itang. 2015. "FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN." *Tazkiya* 16.
- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, dan Een N Walewangko. 2018. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19 (3).
- Karman, Yonky. 2014. *Republik Galau Merajut Asa*. Jakarta: Libri.
- Kemendesa. 2021. "Desa Tanpa Kesenjangan." *sdgsdesa.kemendesa.go.id*.
- Klinken, Gerry van, dan Ward Berenschot, ed. 2016. *In Search of Middle Indonesia*. Jakarta: KITLV & Yayasan Obor Indonesia.
- Melynda Dwi Puspita. "16 Program yang Disiapkan Prabowo untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem". *Tempo.co*, 18 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/16-program-yang-disiapkan-prabowo-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-1232902>.
- Miles, Matthew B., dan Michael A. Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moderamen GBKP, "Pelayanan Diakonia GBKP", Moderamen GBKP, 2026, https://gbkp.or.id/new/?page=pelayanan_diakonia_bahasa&lang=bahasa#yak.
- Nugroho, Fibry Jati. 2019. "Gereja dan Kemiskinan." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3 (1).
- PGI. "Pemberdayaan Daerah 3T: PGI, TCI dan Kemenkop RI Siap Berkolaborasi Lewat Program Koperasi Merah Putih". PGI, 21 Mayıs 2025.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. 2015. *Dokumen Keesaan Gereja 2014-2019*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pratama, Yoghi Citra. 2014. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4 (2).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2025 - Februari 2025*. Jakarta, 2025.
- Puspita, Dita Wahyu. 2015. "ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH." *JEJAK* 8 (1). Department of Drama, Dance and Music, Semarang State University. doi:10.15294/jejak.v8i1.3858.
- Saragih, Markus. 2016. "Keugaharian: Cukup dan Berbagi untuk Keberlanjutan Hidup." *Berita Oikumene*, Februari.
- Situmorang, Anggun P. 2021. "Mengintip program pengentasan kemiskinan sejak era Presiden Soeharto hingga Jokowi." *Merdeka.com*. Oktober.
- Stegemann, Wolfgang. 1989. *Injil dan Orang-orang Miskin*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Stott, John. 1994. *Isu-isu Global*. Jakarta: YKKBK.

- Tomasoa, J.J. 1971. *Sekitar Geredja dan Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- YAK GBKP. “Kelompok Dampingan ”. YAK/PARPEM GBKP, 2026.
https://yakparpem.org/2025/?page_id=490.
- YAK GBKP. “Program YAK GBKP”. YAK/PARPEM GBKP, 2026.
https://yakparpem.org/2025/?page_id=148.
- Yewangoe, A.A. 1989. *Theologia Crucis Di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.